

---

## STRATEGI KOMUNIKASI BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KOTA PADANG DALAM MENSOSIALISASIKAN KEBIJAKAN SENSUS PENDUDUK KEPADA MASYARAKAT

Mila<sup>1</sup>, Wakidul Kohar<sup>2</sup> & Indraddin<sup>3</sup>

1 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Andalas

2, 3 Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Andalas

Email: [annisamiela@yahoo.com](mailto:annisamiela@yahoo.com)

### *Abstract*

*This research was conducted to find out the communication strategy carried out by the Padang City BPS in communicating the population census policy to the community. This research was based on the implementation of the 2010 population census policy which was a major event held simultaneously in all regions of Indonesia including the City of Padang. To achieve effective communication where all the people of Padang City are willing to participate in the success of the 2010 population census policy without being missed or not recorded, a carefully planned communication strategy is needed. The communication strategy that has been implemented by Padang City BPS managerially has gone through the stages of communication strategies starting from the planning stage to the evaluation. The form of communication conducted by BPS in Padang City in communicating census policies to the public is media communication, namely by socializing the population census policy through existing communication media. While the form of communication in communicating the population census policy to the community is face-to-face communication with the people of Padang City through structured interviews using questionnaire instruments.*

**Keywords:** *Communication Strategy, Population Census Policy.*

### **A. PENDAHULUAN**

Kebijakan mengenai sensus penduduk di Indonesia, telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan dan menyelenggarakan sensus penduduk adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Sensus penduduk dilakukan pertama kali di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda yaitu pada tahun 1920, yang hanya mencakup Pulau Jawa dan kemudian pada tahun 1930 yang tidak hanya mendata masyarakat di Pulau Jawa, selanjutnya setelah era kemerdekaan sensus penduduk dilakukan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan sensus penduduk yang terakhir dilakukan adalah pada tahun 2010.

Kebijakan sensus penduduk yang ditetapkan oleh pemerintah semata bukan hanya sekedar mendata tetapi memiliki manfaat yang cukup besar dalam memproyeksi program-program pembangunan yang akan dilakukan di masa yang akan datang seperti perencanaan dalam pengembangan pendidikan, pembangunan infrastruktur, transmigrasi serta pemantuan kinerja pencapaian *Millenium Developments Goals* (MDGs) yang dideklarasikan oleh PBB untuk semua anggota PBB termasuk Indonesia. Dengan kata lain dapat dikatakan kebijakan sensus penduduk merupakan bahan evaluasi untuk melihat perkembangan suatu negara.

Pelaksanaan kebijakan sensus penduduk 2010 merupakan kegiatan besar yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak serta setiap BPS yang ada di provinsi dan kabupaten/kota memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pengkomunikasian kebijakan sensus penduduk di wilayah kerja masing-masing, termasuk BPS Kota Padang. Dalam pelaksanaan komunikasi kebijakan sensus penduduk 2010, BPS Kota Padang tentu memiliki strategi-strategi komunikasi sehingga komunikasi kebijakan sensus penduduk 2010 dapat berjalan dengan baik.

Sebagai pelaksana pengkomunikasian kebijakan sensus penduduk 2010 di wilayah Kota Padang, BPS Kota Padang memiliki tanggungjawab untuk mendata setiap masyarakat yang ada di 11 kecamatan dan 104 kelurahan di Kota Padang tanpa ada yang terlewat, dan ini tentu bukanlah hal mudah jika tidak di dukung dengan strategi-strategi komunikasi yang telah direncanakan dengan matang, dan mengingat setiap masyarakat yang ada di wilayah Indonesia memiliki karakter dan budaya yang berbeda dan dalam hal ini BPS Kota Padang tentu memiliki strategi komunikasi tersendiri dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus penduduk 2010 kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti strategi komunikasi yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dalam mensosialisasikan kebijakan sensus penduduk kepada masyarakat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia Rahman dan Diah Fatma Sjoraida, yang meneliti tentang strategi komunikasi pemerintah Kabupaten Subang menyosialisasikan gerakan pembangunan untuk rakyat infrastruktur berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan menggunakan metode studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori interaksi simbolik. Teori ini digunakan karena untuk mengetahui proses interaksi manusia yang menggunakan simbol-simbol dan menjelaskan cara manusia menggunakan simbol-simbol yang dipahami oleh diri dan akan menentukan tindakan mereka dalam interaksi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengkomunikasikan program ini kepada masyarakat dengan cara hierarki pemerintahan dan menyosialisasikan kepada masyarakat secara langsung pada berbagai kesempatan yang ada. Namun *awareness* atau kesadaran masyarakat terhadap program ini masih sangat sedikit yaitu hanya 9% masyarakat yang mengetahui program Gapura Intan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amon Yadi, yang meneliti tentang strategi komunikasi majelis permusyawaratan ulama (MPU) Untuk Meningkatkan Pengamalan Qanun Syari'at Islam Tentang Maisir Di Kabupaten Aceh Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan strategi komunikasi yang dilaksanakan MPU adalah melakukan safari dakwah ke mesjid-mesjid, menerbitkan buletin dan selebaran dan sebagainya, bekerjasama dengan radio dan TV Agara dalam menyampaikan pesan syari'at Islam, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi keagamaan dalam hal sosialisasi qanun no 13 tentang maisir kepada masyarakat, mengadakan kerjasama dengan pesantren-pesantren sebagai salah satu lembaga Pendidikan Islam di tengah masyarakat, dan melaksanakan razia bersama WH dan SATPOL PP.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Adelisa Pratiwi, yang meneliti tentang Strategi Komunikasi Direktorat Penyiaran Dalam Mengkomunikasikan Peraturan Dan Kebijakan Proses Perizinan Penyiaran (Studi Evaluatif pada Kementerian Komunikasi dan Informatika). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan evaluatif. Teori yang digunakan adalah teori strategi komunikasi menurut Lasswell. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi komunikasi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan perencanaan yang ada. Disimpulkan bahwa strategi komunikasi sudah berjalan dengan baik namun pelaksanaan perizinan belum optimal karena kendala wilayah Indonesia yang luas, kurangnya SDM Direktorat Penyiaran, sulitnya waktu koordinasi serta belum adanya sistem database yang berbasis IT.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang. Pemilihan lokasi penelitian dan fokus penelitian ini didasari karena Kota Padang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan karakteristik penduduk yang beragam dan karena itu dalam pengkomunikasian kebijakan sensus diperlukan strategi yang matang dan terencana supaya masyarakat bersedia untuk bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang dalam mensukseskan kebijakan sensus penduduk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain (Moleong, 2006). Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2012). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti analisis data Miles dan Huberman yang terdiri

dari tiga tahap yaitu, kodifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi komunikasi yang telah diterapkan BPS Kota Padang secara manajerial telah melalui tahapan strategi komunikasi mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Secara keseluruhan, berdasarkan temuan peneliti di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus penduduk kepada masyarakat Kota Padang telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat.

Seluruh elemen dalam tahapan komunikasi telah dilakukan dengan sebaik-baiknya yaitu pada tahap analisis audiens yang dilakukan oleh BPS Kota Padang adalah melakukan pengumpulan data mengenai potensi desa/kelurahan dan kecamatan di Kota Padang dari Camat dan Lurah yang bersangkutan. Pada tahap penetapan sasaran komunikasi dilakukan dengan pendekatan rumah tangga, yaitu dengan mempetakan wilayah sensus kedalam unit-unit wilayah kecil yang di sebut Blok Sensus (BS) kemudian petugas sensus BPS Kota Padang mendatangi setiap rumah yang ada di peta wilayah blok sensus untuk mendaftarkan masyarakat yang akan menjadi sasaran komunikasi sensus BPS Kota Padang.

Sementara pada penetapan rancangan strategi BPS merancang komunikasi yang strategis, mulai dari rancangan pesan serta media yang dimanfaatkan guna mendapatkan efek komunikasi yang sesuai dengan yang diinginkan yaitu terjadi efek perubahan perilaku pada masyarakat dan bersedia bekerjasama dengan petugas BPS dalam mensukseskan kebijakan sensus penduduk.

Kemudian pada tahap penetapan kebijakan komunikasi, semua kebijakan yang ditetapkan bersumber dari BPS Pusat karena sensus penduduk merupakan perhelatan besar yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia

secara serentak dan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 dengan penanggungjawab pelaksanaan sensus penduduk adalah Kepala BPS oleh karena itu semua kebijakan bersumber dari BPS Pusat, tetapi meskipun demikian setiap penetapan kebijakan yang diambil berdasarkan konsultasi dari banyak pihak termasuk dari Kepala BPS Kota Padang. Kebijakan yang ditetapkan oleh BPS Kota Padang hanya mengenai rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan dari sensus penduduk. Selanjutnya pada tahap implementasi strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus penduduk mengacu kepada kalender pelaksanaan SP2010 yang ditetapkan oleh BPS Pusat.

Terakhir pada tahap evaluasi komunikasi yang dilakukan oleh BPS adalah evaluasi efek yaitu perubahan perilaku dari masyarakat pada saat pelaksanaan komunikasi kebijakan sensus, guna mengetahui sejauh mana efektifitas dari pesan yang disampaikan melalui media komunikasi yang digunakan, evaluasi lainnya yaitu mengenai data SP2010 serta kedisiplinan petugas lapangan dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus melalui *Post enumeration survey*.

## **E. SIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa BPS Kota Padang selaku pelaksana kebijakan sensus penduduk 2010 di Kota Padang telah melaksanakan tugas dan fungsinya melalui sebuah perencanaan strategi komunikasi yang baik dan terencana. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh BPS Kota Padang dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus kepada masyarakat adalah komunikasi bermedia yaitu dengan mensosialisasikan kebijakan sensus penduduk melalui media komunikasi yang ada. Sementara bentuk komunikasi dalam pelaksanaan mengkomunikasikan kebijakan sensus penduduk kepada masyarakat adalah komunikasi tatap muka dengan masyarakat Kota Padang dan melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen kuesioner.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2009. *Pedoman Teknis BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2012. *Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2010 Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kota Padang dalam Angka 2016*. Padang: BPS Kota Padang.
- Pratiwi, Adelisa. 2012. Strategi Komunikasi Direktorat Penyiaran dalam Mengkomunikasikan Peraturan dan Kebijakan Proses Perizinakan Penyiaran. *Tesis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
- Yadi, Amon. 2012 Strategi Komunikasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk Meningkatkan Pengamalan Qanun Syari'at Islam Tentang Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara. *Tesis*. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.